
Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara

Tabita Trifena Simorangkir¹

Novie Reflie Pioh²

Alfon Kimbal³

ABSTRAK

Remaja yang terganggu kehidupannya saat ini, misalnya risiko seksualitas, pernikahan dini, dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), maka kehidupan masa depannya pun akan terganggu, baik dari segi kesehatan ataupun psikologisnya. Salah satu upaya pemerintah dalam hal ini BKKBN, merespon dan mengatasi permasalahan di kalangan remaja adalah adanya Program Generasi Berencana (GenRe). Program GenRe BKKBN Sulawesi Utara dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan remaja itu sendiri dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana (GenRe) di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dengan acuan-acuan: Standard dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi dan penguatan aktivitas, dan Karakteristik agen atau perangkat pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Standard dan Sasaran Kebijakan, Program Generasi Berencana ini belum tepat sarannya untuk sampai ke seluruh remaja dan tidak tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. 2) Sumber Daya, sumber daya manusia yang kurang berkompeten, sarana dan prasarana yang masih belum cukup memadai. 3) Komunikasi dan penguatan aktivitas, masih jauh dari yang diharapkan belum dilaksanakan secara optimal promosi akan program Generasi Berencana. 4) Karakteristik agen atau perangkat pelaksana, belum merata akan adanya wadah PIK-R/M dan BKR untuk menyampaikan tujuan dari Program Generasi Berencana.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Program Generasi Berencana, BKKBN

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia harus melakukan tindakan agar dapat meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi serta memberdayakan jumlah penduduk yang ada agar terciptanya keseimbangan pertumbuhan yang efektif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu memaksimalkan peranan badan atau instansi yang kompeten dalam menghadapi masalah kependudukan.

Menurut WHO, remaja adalah penduduk yang berusia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 25 tahun 2014, batasan usia remaja adalah 10 sampai 18 tahun. Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), remaja adalah penduduk yang berusia 10-24 tahun dan belum menikah. Dengan demikian, remaja merupakan generasi muda atau kelompok penduduk yang berusia 10-24 tahun dan sedang mengalami masa pubertas atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan untuk siap bereproduksi.

Jumlah penduduk remaja di Indonesia setiap tahun semakin meningkat ini bisa menjadi aset bangsa sekaligus juga masalah bila tidak dilakukan pembinaan dengan baik. Perilaku hidup remaja tentunya akan mempengaruhi pembangunan nasional dalam perspektif kependudukan, karena tentunya permasalahan kependudukan tidak hanya berbicara tentang kuantitas, tetapi juga kualitas manusianya. Kualitas manusia Indonesia 10-20 tahun ke depan akan dipengaruhi dari kualitas remaja saat ini. Remaja merupakan *agent of change* atau agen perubahan untuk

generasi penerus bangsa.

Pada masa remaja perlu dikembangkan pola pikirnya agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk bekal kehidupannya kelak. Remaja yang terganggu kehidupannya saat ini, misalnya terganggu oleh risiko seksualitas, pernikahan dini, dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), maka kehidupan masa depannya pun akan terganggu, baik dari segi kesehatan ataupun psikologisnya.

Program GenRe BKKBN Sulawesi Utara dilaksanakan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan remaja itu sendiri dan pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja.

Dasar hukum dalam rangka pembinaan remaja terhadap permasalahan remaja ini diwujudkan oleh pemerintah dalam berbagai program dan kegiatan yang disebar ke instansi berkaitan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni terbentuknya Program GenRe (Generasi Berencana) adalah Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dalam pasal 48 ayat (1) pada huruf b menyebutkan bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.

Peningkatan kualitas remaja melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Aturan ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No.87 tahun 2014 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga. Program GenRe merupakan kebijakan dari pemerintah guna mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia. Kebijakan ini diamanahkan oleh BKKBN.

Pendekatan kepada remaja dilakukan melalui pengembangan wadah Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) yang dilaksanakan melalui pendekatan dari, oleh dan untuk remaja. Selain pendekatan langsung kepada remaja, pendekatan dilakukan pula kepada orang tua yang memiliki remaja, mengingat keluarga adalah lingkungan terdekat remaja serta merupakan tempat pertama dan utama dalam pembentukan karakter. Pendekatan kepada keluarga yang memiliki remaja dilakukan melalui Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).

Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Program GenRe diimplementasikan sebagai upaya untuk mengedukasi para remaja tentang pentingnya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) seperti bahaya seks bebas, nikah dini, serta NAPZA. Remaja saat ini telah memasuki perilaku beresiko diantaranya menikah di usia dini, terlibat dalam perilaku seks pra nikah, dan menggunakan NAPZA. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, memaparkan jika pernikahan dini untuk wilayah perkotaan di Sulawesi Utara berada di kisaran 19,43 persen dan di pedesaan jauh lebih tinggi mencapai 32,24 persen.

Menurut hasil observasi dari peneliti Program Generasi Berencana BKKBN Sulawesi Utara sendiri masih terasa asing ditelinga remaja dan terkadang disalah artikan dengan artian seperti program yang membahas mengenai pasutri dan alat kontrasepsi. Masih kurangnya sosialisasi tentang Program GenRe ini dan juga Komunikasi Informasi dan

Edukasi (KIE) antara pemerintah dengan para remaja dan juga orangtua yang memiliki remaja serta masyarakat.

Karna pengimplementasian kebijakan program tersebut tidak berjalan secara efektif dan tujuan program tersebut menurut peneliti belum tepat sasarannya sehingga masih banyak terdapat remaja – remaja yang belum menyadari akan pentingnya edukasi (TRIAD KRR) tiga masalah pokok kesehatan reproduksi remaja yakni pernikahan dini, seks pranikah dan NAPZA.

Tinjauan Pustaka ***Implementasi Kebijakan***

Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Pengertian implementasi kebijakan menurut George C. Edward adalah “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat” Winarno (2012:177). Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan pada dasarnya juga mengukur akan keberhasilan atau kegagalan suatu hasil kebijakan yang secara nyata dilaksanakan dilapangan oleh para implementator dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat maupun stakeholder-nya. Pioh, Novie R. and Londa, Very (2016:87)

Van Meter dan Van Horn (Dalam Nawawi, 2009:131) mendefinisikan bahwa: Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Administrator mempunyai tugas secara akuntabilitas dan responsibilitas setiap kebijakan yang diamanatkan untuk diimplementasikan secara nyata terhadap masyarakatnya. (Areros 2015:9).

Mengacu kepada pendapat Van Meter and Van Horn, diartikan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan suatu kegiatan dalam proses kebijakan yang meliputi berbagai tindakan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Inti dari pengertian ini bahwa keputusan-keputusan yang telah dirumuskan diubah menjadi tindakan-tindakan nyata untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pengambil keputusan. (Van Meter and Van Horn dalam Areros 2013:20).

Untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif, maka dapat dilihat dari berbagai model yaitu :

Model Van Meter dan Van Horn,

Teori ini beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja kebijakan. Mereka menegaskan bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang penting dalam prosedur-prosedur implementasi.

Dari pandangan tersebut maka Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan menurut jumlah masing-masing perubahan yang akan

terjadi dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Hal lain yang dikemukakan mereka bahwa yang menghubungkan kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel bebas itu adalah :

a. Standard dan Sasaran Kebijakan, Standard dan Sasaran Kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standard dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara agen dan perangkat implementasi.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia seperti dana yang digunakan untuk mendukung implementasi kebijakan.

c. Komunikasi dan Penguatan Aktivitas

Dalam implementasi program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

d. Karakteristik Agen atau Perangkat Pelaksana

Karakteristik agen atau perangkat pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semua hal tersebut akan mempengaruhi implementasi suatu program. (Mulyadi, 2015:72-73).

Model Merilee S. Grindle,

Merilee menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan yang dimaksud meliputi :

- a) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) Para pelaksana program
- f) Sumber daya yang dikerahkan

Menurut George C. Edward, Untuk melihat bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung secara efektif, maka dapat dalam penelitian ini menggunakan model implementasi George C. Edward III (1980). George Edward dalam (Winarno, 2012 : 177) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut George Edward III, George Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi yaitu

a. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. (Winarno, 2012: 178).

b. Sumber Daya

Menurut George C. Edward bahwa sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurut George C. Edward sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana

c. Disposisi

Menurut George C. Edward, disposisi atau sikap para pelaksana adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan.

d. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Generasi Berencana

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Generasi Berencana (GenRe) adalah program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Program GenRe merupakan salah satu program pembangunan berkelanjutan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya remaja. Program ini dicanangkan sejak tahun 2009. Remaja sebagai generasi penerus bangsa harus mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus demi terciptanya bangsa yang makmur dan sejahtera. Program Generasi Berencana (GenRe) merupakan program untuk mengatasi berbagai permasalahan remaja dan permasalahan kependudukan di Indonesia.

Tujuan dari dibentuknya Program GenRe adalah memfasilitasi remaja belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera. Sasaran utama Program GenRe adalah remaja (10-24 tahun) dan belum menikah termasuk mahasiswa yang belum menikah, sedangkan sasaran sekondernya adalah keluarga yang memiliki remaja.

Pemerintahan

Berdasarkan aspek statistika, maka "pemerintah" adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Menurut R. Mac Iver (dalam Inu Kencana Syafii, 2010:135), pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada.

Pembangunan Kependudukan

Pembangunan menurut Rogers (Rochajat,dkk: 2011:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.

Kependudukan dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan jumlah, umur, perkawinan, agama, jenis kelamin, kelahiran, kematian, jenis kelamin, kualitas, mobilitas dan juga ketahanan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell (2016 : 4) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Menurut Creswell dalam bukunya *Educational Research* penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana peneliti sangat tergantung terhadap informasi dari objek/partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atas kata/kata dan melakukan penelitian secara subyektif (Creswell, 2016:46).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan mengenai Implementasi Program Generasi Berencana di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Pendeskripsian makna implementasi kebijakan tersebut di jelaskan berdasarkan hasil

pengambilan data di lapangan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana ini di laksanakan di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini peneliti juga akan mengumpulkan data dalam waktu 1–2 minggu sampai data yang di perlukan.

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn dengan melihat pada acuan-acuan yaitu :

- a. Standard dan sasaran kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Komunikasi dan penguatan aktivitas
- d. Karakteristik agen atau perangkat pelaksana

Pemilihan informan dalam penelitian ini di dasarkan pada orang-orang yang di pandang mampu memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan berkaitan dengan bidang yang di teliti sehingga data yang di peroleh dapat di akui kebenarannya, yaitu :

1. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara
2. Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara
3. Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga di Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara
4. Masyarakat (4 orang)

Metode yang di gunakan dalam mendapatkan data dan informasi yang valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Analisis data merupakan proses akhir dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2016). Teknik atau metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah induktif dengan menggunakan prosedur

fenomenologis. Teknik ini dipilih karena penelitian ini akan berawal dari hasil temuan khas yang ada di lapangan yang kemudian diinterpretasikan secara umum.

Pembahasan

Standard dan Sasaran Kebijakan, Berdasarkan hasil penelitian standard dan sasaran kebijakan Program Generasi Berencana di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara, Program GenRe merupakan program unggulan dari BKKBN, Program ini memiliki sasaran yang sangat jelas, yakni remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah, mahasiswa/mahasiswi, keluarga yang memiliki remaja, dan masyarakat yang peduli terhadap remaja.

Terkait dengan penelitian peneliti tentang Implementasi Kebijakan Program Generasi Berencana di Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara pada realita atau kenyataannya masih kurang sampai sasarannya kepada para remaja yang ada, karena masih banyak masyarakat terlebih khususnya remaja yang belum terpapar dan belum mengetahui akan Program Generasi Berencana. Berbagai persoalan yang dihadapi remaja saat ini di Sulawesi utara, khususnya pernikahan dini pada kelompok usia 15-19 tahun, yang berimplikasi terhadap tingginya angka kelahiran dan angka perceraian.

Menimbang persoalan yang dihadapi remaja tersebut, maka program GenRe ini sangat tepat untuk diimplementasikan kepada para remaja dengan fokus program, yakni pendewasaan usia perkawinan merupakan sebuah upaya yang telah dilaksanakan oleh BKKBN dalam rangka untuk mendewasakan usia perkawinan pertama kali (21 tahun wanita dan 25 tahun pria), memproteksi remaja agar terbebas dari Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja).

Strategi pendekatan program GenRe pun dipandang cukup efektif. Dalam hal ini BKKBN memfasilitasi terbentuknya wadah bernama Pusat

Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M) dan Bina Keluarga Remaja(BKR), mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat pemerintahan terbawah, yakni desa. PIK R/M merupakan suatu wadah yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja atau mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling bagi remaja. Sedangkan dalam Bina Keluarga Remaja (BKR), setiap keluarga yang memiliki anak remaja dapat saling bertukar informasi dan berdiskusi bersama tentang hal-hal yang berkaitan dengan remaja, meliputi kebijakan program GenRe. Dalam BKR, para orang tua mendapatkan pencerahan mengenai remaja dengan berbagai permasalahan yang mereka hadapi, sehingga menjadi bekal dalam melakukan komunikasi secara efektif dengan anak-anak remaja mereka.

Para remaja yang tergabung dalam PIK R/M dan para orang tua remaja yang tergabung dalam BKR merupakan sasaran pertama dari Program GenRe. Sasaran kedua yaitu para Pembina, pengelola, dan anggota dari lingkungan dekat PIK R/M dan BKR, yaitu keluarga, kelompok sebaya, sekolah/Perguruan Tinggi, organisasi pemuda, dan sebagainya. Dan yang terakhir terdiri dari partai politik, perusahaan, organisasi profesi, LSM, pemerintah DPRD dan sebagainya.

Ini harus ada perhatian khusus dari pemerintah dalam hal ini BKKBN agar lebih memperhatikan para remaja yang belum mengenal dengan adanya program genre ini.

Sumber daya, berdasarkan hasil penelitian pada Sumber Daya akan Program Generasi Berencana di kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara, mempunyai alokasi dana dari pusat untuk menjalankan setiap kegiatan-kegiatan untuk mendukung dalam menjalankan program Generasi Berencana ini.

Sumber daya manusianya ternyata terdapat kendala, baik yang sudah dipercayakan dalam mengelola program GenRe ini. Dukungan finansial dalam membiayai eksistensi program ini juga

sangat minim. Selain masalah dana, kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat implementasi program, seperti tidak tersedianya ruang kesekretariatan guna menciptakan suasana konseling yang nyaman dan aman.

Sehingga kenyataannya program GenRe ini hanya segelintir orang saja yang mengetahuinya, karena menurut penelitian yang ada setiap kegiatan-kegiatan GenRe ini hanya di undang orang-orang yang sudah mengetahui akan program GenRe ini dan tidak menjangkau masyarakat secara luas yang memang sama sekali belum mengetahui akan program GenRe ini.

Komunikasi dan penguatan aktivitas pelaksana, berdasarkan hasil penelitian Komunikasi dan Penguatan aktivitas pelaksana, di kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara, bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran pelaksanaan program GenRe meliputi dua hal diantaranya adalah melalui pendekatan kepada remajanya langsung yang melalui kegiatan PIK R/M dan pendekatan kepada keluarga yang mempunyai anak remaja melalui wadah Bina Keluarga Remaja (BKR). Salah satu dari pelaksanaan Program GenRe ini adalah dengan terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R/M). PIK R/M adalah satu bentuk kegiatan yang dikembangkan oleh program GenRe yang sistem pengelolaannya dari, oleh, dan untuk remaja. Secara umum kegiatan dalam PIK R/M diantaranya adalah pemberian informasi dan konseling tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang meliputi seksualitas, HIV dan AIDS serta NAPZA, serta keterampilan hidup yang meliputi keterampilan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Tantangan terbesar di Indonesia adalah masih tingginya

angka pernikahan yang terjadi pada usia kurang dari 20 tahun di Indonesia. PUP merupakan sebuah upaya yang telah dilaksanakan oleh BKKBN dalam rangka untuk mendewasakan usia perkawinan pertama kali. Dengan Usia ideal untuk menikah yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Tujuan PUP adalah untuk menciptakan remaja yang memahami Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) yaitu menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak, siap dalam membina dan mempersiapkan rumah tangga baik secara fisik maupun secara psikis, mental, dan sosial, sehingga dengan tercapainya usia yang matang dan telah siap untuk menikah diharapkan dapat mewujudkan sebuah keluarga yang berkualitas.

Informasi mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) merupakan hal yang sangat penting bagi seorang remaja untuk memahami mengenai kesehatan reproduksinya sekaligus mengetahui berbagai permasalahannya. Dan yang tidak kalah penting adalah peran dari Duta GenRe, penyuluh KB sebagai ujung tombak BKKBN di daerah, tenaga kesehatan, tokoh-tokoh formal dan informal, tokoh agama, tokoh masyarakat di sekitar lingkungan para remaja dan keluarganya dalam penyampaian informasi mengenai KRR tersebut.

Selanjutnya, PIK R/M adalah wadah remaja dalam mengembangkan Keterampilan Hidup. Remaja diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilakunya tentang Keterampilan Hidup untuk dipraktikkan agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal, serta dapat digunakan dalam mengatasi risiko TRIAD KRR, mempersiapkan kehidupan berkeluarga, dan tantangan hidup lainnya dalam rangka mewujudkan Generasi Berencana.

Dari hasil penelitian peneliti dan informasi dari informan di kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara, bahwa masih kurangnya komunikasi, informasi, edukasi akan Program Generasi Berencana ini baik

secara sosialisasi, pembinaan, penyuluhan yang sudah di lakukan. Karena pada kenyataannya masih kurang luasnya jangkauan atau promosi dari program ini yang dilakukan untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat agar mereka dapat terpapar akan program generasi berencana yang akan menjadi bekal untuk masa depan.

Karakteristik agen atau perangkat pelaksana, berdasarkan hasil penelitian Karakteristik agen atau Perangkat Pelaksana, pada kantor perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara, bahwa Karakteristik agen atau perangkat pelaksana ini yang akan menentukan berhasil atau tidaknya program Generasi Berencana ini. Peneliti menilai sudah adanya Forum Generasi Berencana Provinsi Sulawesi Utara yang menjalankan dan menyebar luaskan dari program GenRe ini.

Pentingnya peran PIK R/M, remaja dapat mencari pengetahuan maupun bertukar informasi mengenai kesehatan reproduksi dalam wadah organisasi tersebut, tentunya akan merasa lebih aman karena terhindar dari tuduhan bernada stero tipe semacam itu. Akan tetapi yang menjadi kendalanya masih banyak PIK R/M yang hanya mencantumkan PIK Remaja sebatas formalitas yang terpampang pada papan nama, dan di dalamnya sama sekali tidak ada kegiatan apa pun, sudah tidak aktif dan mengalami kepasifan atau stagnasi baik yang ada di jalur pendidikan contohnya: sekolah-sekolah, universitas, dan bahkan di jalur masyarakat.

Kurangnya kontrol tenaga PLKB menyebabkan PIK R/M mengalami kepasifan atau stagnasi, bahkan banyak diantaranya yang hanya nama, tanpa ada pengurusnya. Kelompok Generasi Berencana seperti ini sudah tentu berimplikasi terhadap rendahnya pengetahuan para remaja di wilayah tersebut mengenai Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

Penutup Kesimpulan

1. Standard dan Sasaran Kebijakan, Program Generasi

Berencana ini merupakan Program Unggulan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Sasaran dari program ini belum tepat sampai ke seluruh remaja dan tidak tersalurkan dengan baik kepada masyarakat karena masih banyak yang belum mengetahui dari program Generasi Berencana.

2. Sumber Daya, BKKBN sudah menjalankan program ini semestinya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan remaja, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, bahkan turun ke sekolah-sekolah dan masyarakat, akan tetapi masih banyak remaja yang belum terpapar akan program ini secara menyeluruh karena masih kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengelola program GenRe ini, serta dukungan finansial dalam membiayai eksistensi program ini juga sangat minim. Selain masalah dana, kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat implementasi program GenRe.
3. Komunikasi dan penguatan aktivitas pelaksana, masih jauh dari yang diharapkan karena belum dilaksanakan secara optimal, kurangnya promosi dan cakupan mengenai program GenRe baik secara komunikasi, informasi, edukasi akan Program Generasi Berencana ini serta sosialisasi, pembinaan, penyuluhan yang sudah di lakukan. Karena pada kenyataannya masih kurang luasnya jangkauan atau promosi dari program ini yang dilakukan untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat agar mereka dapat terpapar akan program generasi berencana yang akan menjadi bekal untuk masa depan.
4. Karakteristik agen atau perangkat pelaksana, masih jauh dari apa

yang diharapkan karena belum merata akan adanya wadah PIK-R/M dan BKR untuk menyampaikan tujuan dari Program Generasi Berencana. Dengan adanya forum GenRe Sulawesi Utara ternyata belum terlalu aktif dalam mempromosikan program GenRe karena masih banyak PIK R/M yang sudah tidak di monitoring lagi akan keaktifannya dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Saran

1. Pada Standard dan Sasaran Kebijakan, Dalam hal ini program Generasi Berencana (GenRe) yang digagas oleh BKKBN, ditinjau dari tujuan, sasaran maupun strategi pendekatan, diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat bagi permasalahan tersebut dan diupayakan untuk lebih tepat sasaran agar tujuan dari program Generasi Berencana bisa tersampaikan dengan baik dan diketahui oleh masyarakat luas terutama para remaja yang belum sama sekali terpapar akan program Generasi Berencana.

2. Pada Sumber Daya, agar untuk setiap anggaran yang ada untuk program ini serta kegiatan-kegiatannya yang dilakukan tidak hanya kalangan tertentu saja, apa lagi yang sudah mengetahui dari program ini akan tetapi masyarakat umum dapat mengetahui dan turut terpapar akan program Generasi Berencana, serta sumber daya manusia yang mengelola Program Generasi Berencana di kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara sesuai kualitas kemampuan dan lebih profesional.

3. Diharapkan Komunikasi dan penguatan aktivitas pelaksana, untuk lebih di tingkatkan dalam mempromosikan program Generasi Berencana di masyarakat tidak hanya melalui sosialisasi saja akan tetapi promosi melalui media sosial, media cetak dan advokasi dengan stakeholder yang ada serta melakukan

kolaborasi dengan berbagai lintas sektor.

4. Dalam Karakteristik agen atau perangkat pelaksana, lebih di perluas dan ditingkatkan jejaring kerja sama dengan stakeholder agar program Generasi Berencana ini dapat diketahui dan dikenal. Perlu memahami dan memiliki kesadaran bahwa remaja merupakan aset berharga penerus bangsa yang harus diberi perhatian khusus agar menjadi remaja yang berkualitas. Kemudian masyarakat perlu berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe) sehingga tujuan program tercapai secara optimal.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Aeros William. 2013. *Implementasi Kebijakan pada Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado*. Manado: Yayasan Serat. Vol. 20
- Aeros William. 2015. *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Manado: Yayasan Serat. Vol.9.
- Bagoes Mantra, Ida.2009..*Demografi Umum*.Yogyakarta.Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Edisi Keempat*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Harun, Rochajat., & Ardianto, Elvinaro. (2011). *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Pioh, Novie R. and Londa, Very (2016) *Aparat Desa: Efektivitas & Implementasi Kebijakan ADD*. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan

Pembelajaran Universitas Sam ratulangi, Manado.

Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Subandi. 2011. *“Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)”*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung.

Sumber-sumber lain :

<https://genreindonesia.org>
www.bkkbn.go.id
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
www.sulut.bkkbn.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pub. L. No. 52, 1 (2009).

Peraturan Menteri Kesehatan No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.

Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor

30 Tahun 2003.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kependudukan Dan Keluarga Berencana.

